

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang Perhubungan ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-6 sebagai berikut *“Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonom, social dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai”*:

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu : "Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018, yaitu :

1. Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (Tiga) program utama dengan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 37.499.947.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.897.159.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.754.752.707,- terdapat selisih sebesar Rp. 142.406.293,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 73.915.215,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 10.169.500,- dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 58.321.578,-
- 2) **Belanja Langsung** sebesar Rp. 37.499.947.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.489.987.125,- atau sebesar 70,64%, terdapat selisih dan atau efisiensi sebesar Rp. 11.009.959.875,-

Untuk tingkat capaian **sasaran-1** : yaitu terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran, menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan menunjukkan skala **baik**, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang dapat dicapai yaitu sebesar **90,34%**.

Untuk tingkat capaian **sasaran-2** adalah sebesar 159,9%, jika dibandingkan capaian pada tahun 2017 hanya sebesar 93,6% terjadi kenaikan sebesar 66,3%, atau dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran-2 pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup baik dan masuk dalam kategori "**amat baik**"

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah sarana dan prasarana perhubungan terjadi kenaikan sebesar 66,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2017. Perlu diketahui bahwa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan lalu lintas, hal ini didasarkan pada Survey Lali Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Secara Umum pada tahun 2018 Dinas Perhubungan dapat melaksanakan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 125,75% atau masuk kategori '**amat baik**'.

Tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori "**amat baik**" yaitu rata-rata 125,75%, namun secara keseluruhan tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sampai dengan tahun 2018 atau tahun ke-3 dari target RENSTRA baru terpenuhi 56,29%, atau masih belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, 65%, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sering hilang atau terjadi pencurian terhadap rambu yang telah dipasang;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL, LPJU dan tehnik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pembentukan kampung.Lalu Lintas dan sekolah-sekolah;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih *accountable*, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2018.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Perhubungan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun anggaran 2018.

#### **D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan**

Kedudukan Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 disebutkan tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

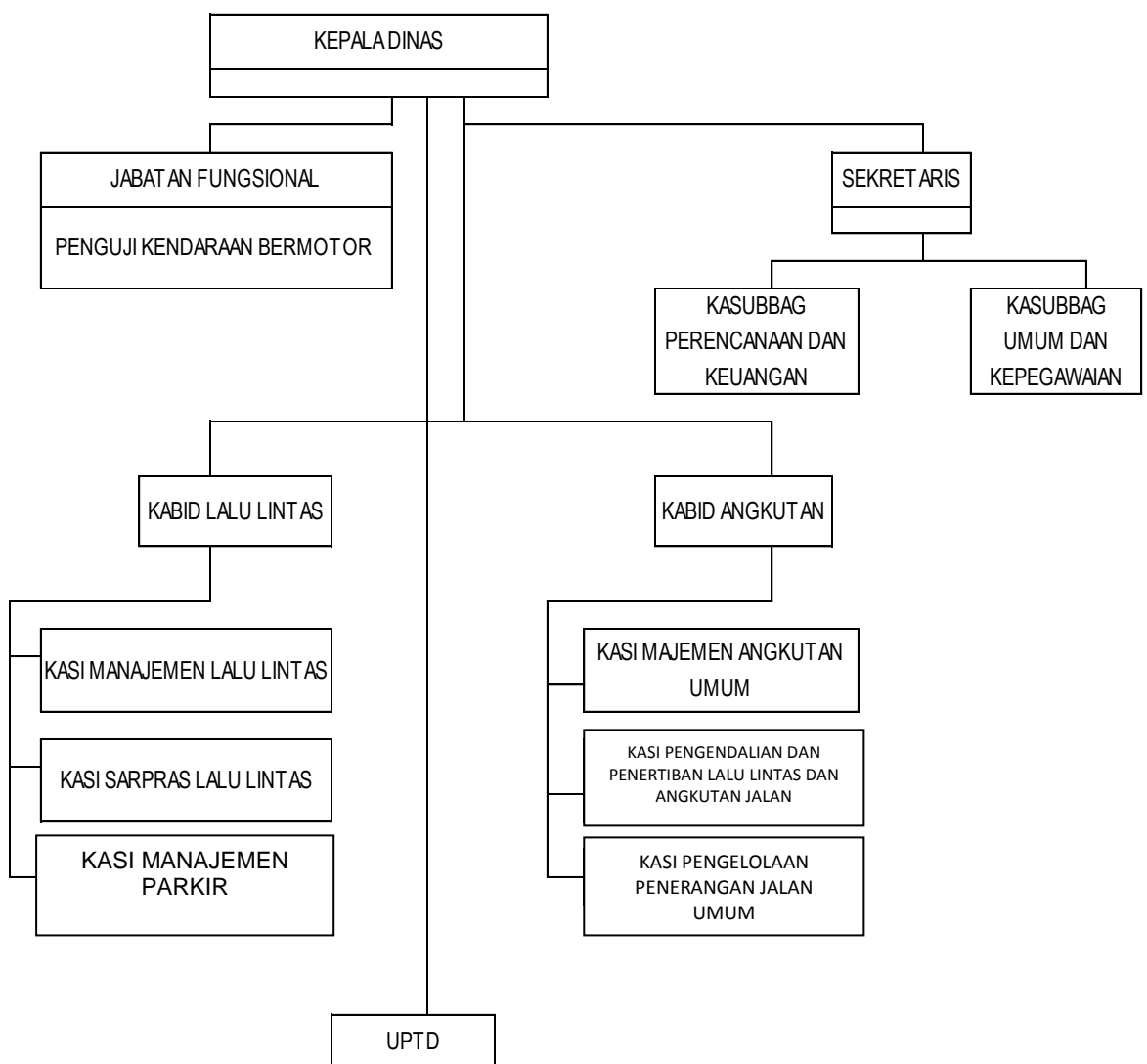
1. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

#### **E. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Subbagian. Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas
  - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
  - 3) Seksi Manajemen Parkir
- d. Kepala Bidang Angkutan
- 1) Seksi Manajemen Angkutan Umum
  - 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 3) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN**



e. Kondisi Kepegawaian

Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang

mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan teknis di bidang Perhubungan, jumlah pegawai Dinas Perhubungan sampai dengan Desember 2018 terinci sebagai berikut :

<b>a. Jumlah Pegawai</b>	: 93 (sembilan puluh tiga) orang
Pegawai Negara Sipil	: 47 (empat puluh tujuh) orang
PTT SK. Bupati	: 12 (dua belas) orang
PTT SK. Kepala Dinas	: 34 (tiga puluh empat) orang

**b. PNS Berdasarkan Pendidikan**

S2	: 3 (tiga) orang
S1	: 15 (lima belas ) orang
Diploma III	: 4 (empat) orang
Diploma II	: 5 (lima) orang
SLTA	: 14 (empat belas) orang
SLTP	: 3 (tiga) orang
SD	: 3 (tiga) orang
<b>J u m l a h</b>	<b>: 47 (empat puluh tujuh) orang</b>

**c. PNS Berdasarkan Golongan**

Golongan IV	: 4 (empat) orang
Golongan III	: 21 (dua puluh satu) orang
Golongan II	: 20 (dua puluh) orang
Golongan I	: 2 (dua) <u>orang</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: 47 (empat puluh tujuh) orang</b>

**d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin**

Laki-laki	: 40 (empat puluh) orang
Perempuan	: 7 (tujuh) orang
Jumlah	: 47 (empat puluh tujuh) orang



**e. Pembagian Pesonil**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG/UNIT</b>	<b>PNS/CPNS</b>	<b>NON PNS (PTT)</b>
1	<b>Kepala Dinas</b>	1	
1	<b>SEKRETARIAT</b>	11	13
2	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>		
	a. INDUK (KANTOR)	7	5
	b. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	6	4
	c. TERMINAL BUKATEJA*)	2	4
	d. TERMINAL KEJOBONG*)	1	2
	TERMINAL JOMPO	0	2
	TERMINAL PENARUBAN	0	1
	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	9	12
3	<b>BIDANG LALU LINTAS</b>	10	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>46</b>

Lebih lengkap mengenai kondisi kepegawaian Dinas Perhubungan diuraikan dalam Daftar Urut Kependidikan (DUK) sebagaimana terlampir.

**f. Sarana dan Prasarana :**

- a. Prasarana Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
- 1) Gedung Kantor Dinas
  - 2) Gedung Terminal Bukateja
  - 3) Gedung Terminal Kejobong
  - 4) Gedung Sub Terminal Penaruban
  - 5) Gedung Sub Terminal Jompo
  - 6) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
  - 7) Gedung Gudang LPJU

## **b. Sarana Operasional**

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) Kendaraan Roda empat      | : 9 ( sembilan ) unit           |
| 2) Kendaraan Roda dua        | : 17 ( tujuh belas ) unit       |
| 3) Sarana Komputer / Printer | : 29 ( dua puluh sembilan) unit |
| 4) Laptop                    | : 11 ( sebelas ) unit           |
| 5) Pesawat Telepon           | : 2 ( dua ) unit                |
| 6) Pesawat HT                | : 42 (empat puluh dua) unit     |
| 7) Repeater                  | : 1 (satu) paket                |
| 8) Peralatan PKB             | : 1 ( satu ) paket              |
| 9) Peralatan Perbengkelan    | : 1 ( satu ) paket              |
| 10) Truk Sandelift LPJU      | : 1 unit                        |
| 11) Truk Skylift             | : 1 unit                        |

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinhub terdiri dari KIB A – E senilai Rp.72.200.904.876,- ( Tujuh Puluh Dua milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat ribu Delapan ratus tujuh puluh enam rupiah )

## **g. Kondisi Ekonomi**

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinas Perhubungan yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

### **1) Fasilitas Angkutan :**

- a. Panjang jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai 888.084 Km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 888.710 Km, kerikil sepanjang 42 Km dan jalan tanah sepanjang 52 Km.
- b. Kendaraan niaga yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 846 kendaraan, terdiri dari 42 unit kendaraan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 101 kendaraan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), 203 unit

angkutan Kota, 457 unit angkutan perdesaan, 13 unit angkutan Pariwisata dan 30 unit angkutan Taxi.

- c. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi di kabupaten purbalingga terdapat 1 terminal type A berada di Bobotsari yang pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan, 1 terminal type B berada Purbalingga yang pengelolaannya oleh Pemerintah Propinsi serta 3 terminal type C yaitu Terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan 2 (dua) sub terminal, yaitu sub terminal Penaruban dan sub terminal Jompo.

**2) Fasilitas Lalu Lintas :**

NO	FASILITAS Perlengkapan Jalan	JUMLAH	
		JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Marka Jalan	78,6 km	224.422 km
2.	Rambu-rambu	515 bh	817 bh
3.	RPPJ	71 bh	113 bh
4.	Guard Raill	1052 m	3184 m
5.	Traffic Light	15 unit	13 unit
6.	Warning Light	22 unit	38 unit
7.	Traffic cone	0 buah	100 buah
8.	Halte	12 buah	7 buah
9.	Paku marka	460 buah	559 buah
10.	Deliniator	105 bh	146 bh
11	Safety Mirror	10 bh	26 bh
12	Lampu PJU	91 buah	7.430 buah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021 .

##### **A.1. Visi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

##### **A.2. MISI :**

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : ” *Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : ” *Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan*

*masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*

### **A.3. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-6 terkait dengan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut “ Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dengan indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

### **A.4. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh dinas Perhubungan adalah Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas, dengan indikator kinerja persentase sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai

### **A.5. Kebijakan**

Arah dari kebijakan urusan Perhubungan ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkatkan pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, arah kebijakan tersebut yaitu :

- 1) Peningkatan pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan;
- 2) Mendukung pengadaan transportasi massal (BRT), reaktifasi jalur kereta api, .pembukaan akses transportasi udara.

### **A.6. Prioritas Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 3 ( tiga ) Program sebagai berikut :

1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan pelayanan Angkutan

#### **1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- f. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja
- g. Pembuatan Gudang

## **2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- a. Pengelolaan Kebersihan Terminal
- b. Operasi Tehnis Laik Jalan
- c. Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
- d. Pengadaan Tanah Perluasan Bandara
- e. Pemeliharaan Terminal Tipe C
- f. Revitalisasi Peralatan PKB
- g. Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Pembinaan dan Monitoring Angkutan
- i. Fasilitasi Pembangunan Bandara
- j. Mudik Lebaran Gratis
- k. Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- l. DED Terminal Kutasari
- m. Fasilitasi Pemilihan Pelajar Pelopor dan Sopir Teladan

## **3. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas**

- a. Pengadaan Perlengkapan Jalan
- b. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- c. Pemeliharaan LPJU
- d. Pembangunan Halte
- e. Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- f. Pembinaan Petugas Parkir
- g. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Lain
- h. Fasilitasi Forum LLAJ
- i. Fasilitasi Penilaian Wahana Tata Nugraha
- j. Fasilitasi Tim Andalalin
- k. Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Ban-Gub)

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Mendasarkan pada RENSTRA tahun 2016 - 2021 dan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan selaku pengguna anggaran dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan selanjutnya ditanda tangani bersama. Isi Perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Tujuan</b>			
	Menurunnya pelanggaran lalu lintas	Angka penurunan pelanggaran lalu lintas	%	70
	<b>Sasaran</b>			
	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	%	70

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 2.193.600.000,00</b>	
2.	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>Rp. 19.542.790.000,00</b>	
3.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Rp. 15.763.557.000,00</b>	

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

##### ***A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis***

Hingga akhir tahun 2018 Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu "Meningkatnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" , dengan indikator tujuan yaitu : persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan indikator dari tujuan yaitu : persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui selama 3 (tiga) tahun pelanggaran Lalu Lintas



terjadi kenaikan pelanggaran, hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dari Satlantas Polres Purbalingga yaitu :

**Tabel III.1  
Data Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	RINCIAN	
			RODA 2	RODA 4
1.	2016	22.562	20.331	2.251
2.	2017	35.600	32.411	3.189
3.	2018	30.000	26.649	3.351

(sumber : data Satlantas Polres Purbalingga)

Secara angka pelanggaran lalu lintas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan pelanggaran sebesar 58% jika dibandingkan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas pada tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi penurunan pelanggaran sebesar 16% hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pengguna jalan pada peraturan lalu lintas meningkat, yaitu ketaatan terhadap perlengkapan standarisasi kendaraan bermotor, SIM dan rambu-rambu lalu lintas.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan angkutan penumpang dan angkutan barang, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan operasi laik jalan, yaitu operasi pemeriksaan administrasi berupa Buku Uji Kendaraan, Kartu Pengawasan dan Trayek.

**Table III.2.  
Data Operasi Laik Jalan Tahun 2016, 2017 dan tahun 2018**

No.	Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kendaraan Yang Diperiksa	Jumlah Kendaraan Yang Disidang
1.	2016	20 Kegiatan	500 Kendaraan	49 Kendaraan
2.	2017	19 Kegiatan	670 Kendaraan	60 Kendaraan
4.	2018	13 Kegiatan	1302 Kendaraan	46 Kendaraan

(sumber : data Dinhub Kab. Purbalingga)

Dari table diatas diketahui bahwa untuk tahun 2018 terjadi penurunan pelanggaran laik jalan sebesar 30% jika dibandingkan tahun 2017.

Selain untuk mewujudkan tujuan Dinas, terdapat (dua) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut

1. Sasaran terwujudnya kelancaran adminitrasi perkantoran:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA KELANCARAN ADMINITRASI PERKANTORAN

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran tersebut tersaji dalam matrik dibawah ini, yaitu :

**Tabel III.3 :**  
**Sasaran terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (R/T)x100%
1. Kelancaran Administrasi perkantoran	Terlaksananya rapat koordinasi	506	440 kegiatan	86,6
	Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	100%	100%	100
	persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu	100 %	100%	100
	persentase realisasi anggaran SKPD	100 %	70,64%	70,64
	Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor	90 pegawai dan masyarakat purbalingga	90 pegawai dan masyarakat purbalingga	100
	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor	7 gedung, 6 kend. Dinas roda empat, 18 kend.dinas roda dua, komputer dan alat komunikasi (HT, Repeater)	9 gedung, 9 kend. Dinas roda empat, 19 kend.dinas roda dua, komputer dan alat komunikasi (HT, Repeater)	100
	Terlaksananya diklat/bimtek	15 pegawai	12 pegawai	80
	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan pub lik	100 %	82,63%	82,63
<b>Rata rata capaian kinerja sasaran 1</b>				<b>91,6%</b>

secara umum capaian kinerja pada sasaran **Kelancaran Adminstrasi Perkantoran sebesar 91,6%**. masuk dalam kategori "*baik*", jdan hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang hanya tercapai 90,34%

Sasaran tersebut dapat dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada indikator persentase realisasi anggaran SKPD hanya tercapai sebesar 70,64%.

Sasaran ini tercapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut Penyediaan

- a) Bahan dan Jasa perkantoran
- b) Rapat – Rapat koordinasi dan konsultasi
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d) Pengadaan Sarana dan prasarana kantor
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- f) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
- g) Pembuatan Gudang

## 2. Sasaran Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Bermanfaat Untuk Keselamatan Berlalu Lintas

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

### SASARAN 2 : TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG BERMANFAAT UNTUK KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas mendapatkan nilai rata-rata 159,9% dengan kategori "*Amat Baik*", dengan rincian pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel III 4 :  
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Bermanfaat Untuk Keselamatan Berlalu Lintas**

Indikator Kinerja Satuan	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)

Indikator Kinerja Satuan	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Persentase Sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai :	93,6	65	159,9	246%	56,29

**Tabel III.5 :  
Rata-rata Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2018**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN YANG MEMADAI	KONDISI IDEAL (2016-2021)	TARGET 2018	REALISASI 2018	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	15.000	2000	6635	331,75
2	- Rambu Standar	1.000	75	44	58,6
3	- RPPJ	44	5	13	260
4	- Safety Mirror	25	0	0	0
5	- Guard Rail	2.000	200	200	100
6	- Traffic Light	14.	2	2	100
7	- Warning Light	18	2	5	250
8	- Road Barrier	140	20	0	0
9	- Traffic Cone	350	50	100	200
10	- Paku Marka	1.400	200	559	279,5
11	- Halte	35	6	10	166,6
12	- LPJU	3600	550	724	132
13	- Terminal	10	-	2	200
<b>RATA – RATA</b>					<b>159,9</b>

**Tabel III.6 :  
Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Th. 2017 dan 2018:**

INDIKATOR KINERJA	SARPRAS PERHUBUNGAN	2017			2018		
		YANG SEHARUSNYA	YANG TEREALISASI	%	YANG SEHARUSNYA	YANG TEREALISASI	%
Persentase Sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai	- Marka Jalan	750	995	132,6	2000	6635	331,75
	- Rambu-rambu	50	100	200	75	44	58,6
	- RPPJ	5	6	120	5	13	260
	- - Safety Mirror	0	0	0	0	0	0
	- Guard Rail	400	100	25	200	200	100
	- Traffic Light	2	1	50	2	2	100
	- Warning Light	2	4	200	2	5	250
	- Road Barrier	10	0	0	20	0	0
	- Paku Marka	50	325	130	50	100	200
	- Traffic cone	250	100	200	200	559	279,5
	- Halte	0	0	0	6	10	166,6
	- LPJU	500	797	159,4	550	724	132
	- Terminal	0	0	0	-	2	200
	rata-rata			93,6			159,9

Perolehan capaian kinerja tertinggi pada indicator kinerja pembuatan marka jalan, yaitu 33,75%, hal ini dikarenakan tahun 2018 prioritas pengadaan fasilitas perlengkapan jalan pada pembuatan marka jalan dan pada perubahan anggaran mendapat tambahan anggaran untuk pengadaan marka jalan.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk seluruh jalan di Kabupaten Purbalingga maka capaian yang telah diperoleh adalah sebagai berikut bahwa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2018 sudah terpenuhi sebanyak 56,29% dari keseluruhan yang dibutuhkan, hal ini dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

**Tabel III.7 :**  
**Capaian Kinerja Sarana Prasarana Perhubungan Secara Keseluruhan sampai dengan tahun 2018**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN	KONDISI IDEAL (2016-2021)	REALISASI SAMPAI DENGAN 2018 (2016,2017,2018)	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	15.000	9630	64,2
2	- Rambu Standar	1.000	244	24,4
3	- RPPJ	44	25	56,8
4	- Safety Mirror	25	6	24
5	- Guard Raill	2.000m	780	39
6	- Traffic Light	14	4	28,5
7	- Warning Light	18	13	72,2
8	- Road Barrier	140	45	32
9	- Traffic Cone	330	884	267,9
10	- Paku Marka	1.400	200	14
11	- Halte	35	16	45,7
12	- LPJU	3.600	1521	42
13	- Terminal	10	2	20
	Rata-rata			<b>56,29</b>

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga terjadi kenaikan sebesar 22.37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2017. Perlu diketahui bahwa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan lalu lintas, hal ini didasarkan pada hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR).

Dengan sarana prasarana perhubungan yang memadai, pelayanan perhubungan akan semakin baik dan diharapkan tingkat kecelakaan lalu lintas bisa ditekan atau semakin sedikit dan pada saatnya bisa mencapai *zero accident*.

Sasaran 2 ini tercapai didukung melalui 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Jalan
  - b. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
  - c. Pemeliharaan LPJU
  - d. Pembangunan Halte
  - e. Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan angkutan Lebaran
  - f. Pembinaan Petugas Parkir
  - g. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
  - h. Fasilitas Forum LLAJ
  - i. Fasilitas Penilaian Wahana Tata Nugraha
  - j. Fasilitas tim andalalin
  - k. Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Ban Gub)
  
2. Program Peningkatan Manajemen Angkutan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Kebersihan Terminal
  - b. Operasi Teknik Laik Jalan
  - c. Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
  - d. Pengadaan Tanah Perluasan Bandara
  - e. Pemeliharaan Terminal Tipe C
  - f. Revitalisasi Peralatan PKB
  - g. Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Pembinaan dan Monitoring Angkutan
  - i. Fasilitas Pembangunan Bandara
  - j. Mudik Lebaran Gratis
  - k. Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
  - l. DED Terminal Kutasari
  - m. Fasilitas Pemilihan Pelajar Pelopor dan Sopir Teladan

Tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori "amat baik" yaitu rata-rata 125,75%, namun secara keseluruhan tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sampai dengan tahun 2018 atau tahun ke-3 dari target RENSTRA baru terpenuhi 56,29%, atau masih belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sering hilang atau terjadi pencurian terhadap rambu yang telah dipasang;

2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai teknik APILL, LPJU dan teknik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pembentukan kampung.Lalu Lintas dan sekolah-sekolah;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

**Tabel III.8 :  
Realisasi Anggaran**

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	807.600.000	783.711.114	97.04
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	140.000.000	139.187.199	99.42
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	500.000.000	477.329.273	95.47
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	66.000.000	56.691.017	85.90
	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	19.424.000	97.12
	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100.00
	7	Pembuatan Gudang	650.000.000	556.183.000	85.57
Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Pengelolaan Kebersihan Terminal	162.000.000	156.578.000	96.65
	2	Operasi Teknis Laik Jalan	20.000.000	17.764.550	88.82
	3	Pengadaan Bahan Pengecatan PKB	15.000.000	14.860.000	99.07
	4	Pengadaan Tanah Perluasan Bandara	14.363.357.000	14.270.096.823	99.35

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
	5	Pemeliharaan Terminal Tipe C	400.000.000	398.922.000	99.73
	6	Revitalisasi Peralatan PKB	210.000.000	207.294.394	98.71
	7	Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	199.660.000	99.83
	8	Pembinaan dan Monitoring Angkutan	133.000.000	114.341.600	85.97
	9	Fasilitas Pembangunan Bandara	75.000.000	72.438.150	96.58
	10	Mudik Lebaran Gratis	70.200.000	69.198.000	98.57
	11	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000	49.920.000	99.84
	12	DED Terminal Kutasari	50.000.000	0	0.00
	13	Fasilitas Pemilihan Pelajar Pelopor dan Sopir Teladan	15.000.000	7.590.000	50.60
Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	1	Pengadaan Perlengkapan Jalan	2.223.193.000	2.208.293.750	99.33
	2	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	4.697.832.000	4.337.902.360	92.34
	3	Pemeliharaan LPJU	1.438.163.000	1.318.972.769	91.71
	4	Pembangunan Halte	310.000.000	298.518.000	96.30
	5	Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	226.300.000	225.438.400	99.62
	6	Pembinaan Petugas Parkir	180.000.000	179.977.500	99.99
	7	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	150.000.000	148.199.000	98.80
	8	Fasilitas Forum LLAJ	20.000.000	19.800.000	99.00
	9	Fasilitas Penilaian Wahana Tata Nugraha	0	0	0.00
	10	Fasilitas Tim Andalalin	17.500.000	12.895.000	73.69
	11	Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Kab Purbalingga (Ban Gub)	10.279.802.000	117.961.726	1.15



**Tabel III.9:  
Analisis Efisiensi per Sasaran Tahun 2018**

<b>SASARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% ANGGARAN</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.193.600.000	2.043.525.603	93,15	91,6	
Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang bermanfaat untuk Keselamatan Berlalu Lintas	35.306.347.000	24.446.621.022	69,2	159,9	Secara anggaran terdapat Efisiensi, hal ini diperoleh dari nilai Kontrak/ lelang. Tetapi dari nilai capaian kinerja dapat dikatakan blm memenuhi target, hal ini dikarenakan anggaran pengadaan sarpras perhubungan hanya cukup utk pengadaan sebagaimana tsb diatas. Dan kegiatan yang lain bersifat mendukung pelaksanaan tupoksi dinas perhubungan
<b>Jumlah</b>	<b>46.962.202.000</b>	<b>45.089.628.688</b>	<b>70,64</b>	<b>125,75</b>	

**B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinas Perhubungan**

**Target dan Realisasi Pendapatan**

**Tabel III.10 :  
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2018**

	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>TARGET ( Rp. )</b>	<b>REALISASI ( Rp. )</b>	<b>( % )</b>
1.	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.001.325.800</b>	<b>100.07</b>
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<b>700.000.000</b>	<b>669.821.840</b>	<b>95.69</b>
3.	Retribusi Terminal :			
	a. Terminal Bukateja.	<b>71.496.000</b>	<b>68.987.000</b>	<b>96.49</b>
	b. Terminal Kejobong.	<b>28.800.000</b>	<b>26.676.000</b>	<b>93.63</b>
	c. Terminal Kutabawa.	<b>8.000.000</b>	<b>4.989.000</b>	<b>62.36</b>
	d. Terminal Kutasari	<b>19.440.000</b>	<b>16.309.000</b>	<b>81.39</b>
	e. Terminal Jompo	<b>14.400.000</b>	<b>14.411.040</b>	<b>100.08</b>
	f. Terminal Penaruban	<b>5.544.000</b>	<b>7.144.000</b>	<b>128.86</b>
4.	Retribusi Ijin Trayek.	<b>160.000.000</b>	<b>107.890.000</b>	<b>67.43</b>
		<b>3.007.680.000</b>	<b>2.917.553.680</b>	<b>97.00</b>

Lebih rinci mengenai realisasi PAD 2018 dapat dilihat pada lampiran.

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. **3.007.680.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.917.553.680,-** atau tercapai **97.00%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tercapai kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya perolehan PAD dari retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi Ijin Trayek.

## **B.2. Permasalahan dan solusi dalam Perolehan PAD tahun 2018 :**

### **1) Permasalahan**

- a) Rendahnya masyarakat untuk memperpanjang trayek tepat waktu, hal ini dikarenakan potensi penumpang yang semakin sedikit/ angkutan sepi dan mayoritas masyarakat beralih kepada moda transportasi roda dua dan atau kendaraan pribadi yang lain.

- b) Banyak kendaraan angkutan umum yang tidak beroperasi karena dianggap sudah tidak menguntungkan sehingga beralih pemanfaatannya untuk pribadi (plat hitam);.
- c) Dari 20 Angkutan perdesaan jurusan Banjarnegara – Kejobong yang masuk Terminal Kejobong hanya 2 angkutan dan hanya beroperasi pada hari pasaran saja sehingga tidak ada penarikan retribusi.
- d) Dari 33 angkutan perdesaan jurusan Bukateja – Kejobong yang beroperasi hanya 12 angkutan.
- e) Mikro bis jurusan Penaruban – Kejobong dari 17 unit kendaraan, yang beropersi hanya 4 unit, hal ini dikarenakan sepi penumpang (banyak yang beralih moda transportasi)
- f) Terdapat beberapa jalur trayek yang kendaraannya tidak beroperasi maksimal sehingga tidak memperpanjang ijin seperti :
  1. Jalur H jurusan Kutasari-Walik-Kr Klesem-Purbayasa-Padamara dan 9 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 3 unit, tidak aktif 2, 4 unit dihentikan.
  2. Jalur J jurusan Bukateja – Kembangan –Tidu – Kemangkon - Panican-Kr.Kemiri – Senon – Palumutan – Bokol - Kedungbenda dari 17 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 6 unit, tidak aktif 4, 7 unit dihentikan.
  3. Jalur P Bobotasari – Selaganggeng – Serayu – Pratin - Kutabawa dari 18 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 5 unit, tidak aktif 11, 2 unit dihentikan.
  4. Jalur Q Bobotsari-Selaganggeng – Mrebet – Pagerandong - Pengalusan-Binangun – Cipaku - Karangangka dari 20 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 4 unit, tidak aktif 15, 1 unit dihentikan
  5. Jalur V Pagutan – Metenggeng – Tobong – Kutasari – Karangreja - Kr.Klesem – Dawuhan – Bojanegara – Babakan - Kalikabong (pasar hewan), dari 22 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 11, 9 unit dihentikan
  6. Jalur X Kebogohan - Ps.Bojongsari dari 4 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 2, 1 unit dihentikan
  7. Jalur Y Terminal penaruban-sempor lor-brecek-kaligondang-cilapar-selanegara-selakambang-sidareja-pagerandong-sidanegara-arenan-slinga dari 5 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 3 unit.

- g) PAD dari pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2018 tercapai 89,72%, hal ini dikarenakan regulasi yang kurang mendukung, sedangkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Kabupaten Purbalingga tidak terjadi kenaikan, yaitu tetap pada angka 8.315 unit
- h) PAD dari pelayanan di Terminal tercapai 98,07%, hal ini dikarenakan :
  - 1. Pelayanan di Terminal Kutabawa ditiadakan karena statusnya milik Pemerintah Desa Kuabawa dan terminal sudah dirobohkan, sehingga petugas pelayanan di terminal Kutabawa ditarik menjadi petugas pelayanan trayek.
  - 2. Terminal Kutasari sudah beralih fungsi untuk Puskesmas, sedangkan pengganti Terminal belum ditentukan, sehingga pelayanan Terminal Kutasari ditiadakan.

## **2) SOLUSI :**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas Dinas Perhubungan, mencoba mengatasinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan pembinaan terhadap seluruh staf (staf meeting) setiap sebulan sekali guna meningkatkan loyalitas dan kinerja.
- b. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan hendaknya dalam menetapkan target PAD dengan melihat potensi yang ada/senyatanya melalui kegiatan kajian/survey potensi PAD
- c. Dilaksanakannya operasi tehnik laik jalan setiap bulan sekali, hal ini dimaksudkan disamping untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban para pengguna angkutan baik angkutan penumpang maupun barang juga dimaksudkan menjaring angkutan yang sudah tidak laik jalan supaya melakukan uji kir kendaraan agar kendaraan tersebut menjadi laik jalan dan yang telah habis masa ijin trayek supaya memperpanjang ijin trayek, sehingga dengan kegiatan ini bisa didapat banyak manfaat, yaitu menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Uji Kir kendaraan bermotor dan Perpanjangan Ijin Trayek angkutan baik angkutan penumpang maupun barang.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah berjalan yaitu T.A. 2018 guna mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

1. Tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan Tahun 2018 :

- 1.1. Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. **3.007.680.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.917.553.680,-** atau tercapai **97.00%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tercapai kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya perolehan PAD dari retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi Ijin Trayek.
- 1.2. Capaian Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga menunjuk pada slaka “ **amat baik**” yaitu **rata-rata 125,75%**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar 70,64% dan Realisasi fisik kegiatan sebesar 96,23%. Keberhasilan Dinas Perhubungan dibuktikan dengan telah terbayarnya 47 bidang pengadaan tanah untuk perluasan bandara Jenderal Besar Soedirman

#### B. Permasalahan Yang dihadapi

Secara prinsip dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 Dinas Perhubungan tidak mengalami permasalahan yang menonjol, hanya saja dalam pelaksanaan tugas sehari – hari yaitu pada kegiatan pemeliharaan LPJU sangat terhambat dalam melaksanakan

pembetulan dikarenakan sarana truk sandelift yang ada kondisinya sudah sering rusak karena factor usia bahkan pada tahun 2018 sempat mangkrak selama 3 bulan dikarenakan kerusakan onderdil yang tidak tersedia di Purbalingga, perlu diketahui bahwa kendaraan operasional pemeliharaan LPJU hanya terdapat 2 unit truk dengan tenaga tehnik sebanyak 10 orang, sehingga sangat kekurangan untuk melakukan pemeliharaan LPJU se-Kabupaten Purbalingga.

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, yaitu Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Kabupaten Purbalingga (Bangub), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.279.802.000,- realisasi anggaran Rp 117.961.726,- (1,15%) Realisasi Fisik berupa lelang pembuatan dokumen perencanaan, hal ini dikarenakan tidak ada dokumen penyedia yang memenuhi syarat sehingga gagal lelang.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2018 Dinas Perhubungan akan tetap mengupayakan agar lebih baik dengan meningkatkan kualitas manajemen kegiatan dan administrasi sehingga tidak akan ditemui lagi kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 semoga dapat bermanfaat, terima kasih

Purbalingga, Pebruari 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**R. IMAM WAHYUDI, SH. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630418 198903 1 006

